

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kegiatan yang dilakukan melalui pelaksanaan atau perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut baik berupa pengetahuan maupun nilai dan sikap.

Fungsi dan tujuan utama pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Besarnya tujuan pendidikan di Indonesia akan memberikan tanggung jawab yang besar pula bagi Bangsa Indonesia pada terlaksananya pendidikan yang senantiasa dicita-citakan.¹

B. Definisi Pembelajaran PPKN

Pembelajaran PPKN merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung

¹ Evi Damayanti dan Ismiyati “Pengaruh Kompensasi Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru”, *Economic Education Analysis Journal*, 9,1 (Januari, 2020): 34

jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang baik.²

Menurut Udin S. Winataputra, dkk. Dalam pembelajaran PPKN, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru. Metode yang dipilih dalam pembelajaran PPKN harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran PPKN, karakteristik materi pembelajaran PPKN, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia dan kebutuhan siswa itu sendiri.³

Veldhuis mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan, kita harus membedakan antara aspek-aspek pengetahuan (knowledge), sikap dan pendapat (attitudes and opinions), keterampilan intelektual (intellectual skills), dan keterampilan partisipasi (participatory skills).

Aspek-aspek di atas harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran menjadi suatu sinergi sehingga pesan pembelajaran dapat ditangkap oleh siswa secara benar dan optimal serta dapat diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Guru dapat mengupayakan terwujudnya hal tersebut dengan cara melaksanakan proses pembelajaran yang tepat.⁴

C. Langkah-langkah Pembelajaran PPKN

Alur atau langkah-langkah dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran PPKN meliputi tujuh tahap, yaitu:⁵

1. Menetapkan pelajaran yang akan dipadukan dengan kearifan lokal.
2. Mempelajari KD pada kelas dan semester yang sama.
3. Menentukan indikator dan hasil belajar dalam setiap mata pelajaran dan dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada.

² Ahmad Musaddiq, *pembelajaran PPKN SD*, Bandung 2018

³ Udin S. Winata Putra.DKK, *Sistem Pembelajaran PPKN*, Jakarta 2007

⁴ Veldhuis, *Aspek-aspek Pembelajaran*, Jakarta 1998

⁵ Hasanuddin Burhan, *Langkah-langkah Pembelajaran PPKN*, Bogor 2015

4. Memilih dan menetapkan materi yg akan diajarkan dengan menggunakan kearifan lokal sebagai media konkrit dalam pembelajaran.
5. Membuat matriks hubungan kompetensi dasar dan materi pokok serta memperhatikan esensi dari kearifan lokal pada materi.
6. Menyusun silabus pembelajaran PPKN.
7. Menyusun satuan pelajaran pembelajaran PPKN.

D. Metode Diskusi

1. Konsep Diskusi

Kata “diskusi” menurut Armai Arief berasal dari bahasa latin, yaitu “*discussus*” yang berarti “*to examine*”. “*Discussus*” terdiri dari akar kata “*dis*” dan “*cuture*”. “*Dis*” artinya terpisah, sementara “*cuture*” artinya menggoncang atau memukul. Secara etimologi, “*discutire*” berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. Atau dengan kata lain membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikannya (*to clear away by breaking up or cuturing*). Secara umum pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi (*information sharing*), saling mempertahankan pendapat (*self maintenance*) dalam memecahkan sebuah masalah tertentu (*problem solving*).⁶

Pengertian metode diskusi menurut Armai Arief adalah salah satu alternatif, metode / cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat siswa.

Metode diskusi dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Ada 3 langkah utama dalam metode diskusi:

- a. Penyajian, yaitu pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi dan pemecahan dari murid.

⁶Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam ,hal.145

- b. Bimbingan, yaitu pengarahan yang terus-menerus dan secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Pengarahan ini diharapkan dapat menyatukan pikiran-pikiran yang telah dikemukakan.
- c. Pengikhtisaran, yaitu rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi.

Keberhasilan metode diskusi banyak ditentukan oleh adanya tiga unsur yaitu: pemahaman, kepercayaan diri sendiri dan rasa saling menghormati.⁷

2. Macam-macam Diskusi

Untuk dapat melaksanakan diskusi di kelas, seorang Guru harus mengetahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis diskusi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan jenis diskusi apa yang akan digunakan. Ditinjau dari sudut formalitas dan jumlah peserta yang mengikutinya, maka menurut Abu Ahmadi diskusi digolongkan menjadi:⁸

a. Diskusi Formal

Diskusi ini terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan atau semi pemerintahan, dimana dalam diskusi itu perlu adanya ketua dan penulis serta pembicara yang diatur secara formal, contoh: sidang DPR. Aturan yang dipakai dalam diskusi ini ketat dan rapi. Jumlah peserta umumnya lebih banyak bahkan dapat melibatkan seluruh siswa kelas. Ekspresi spontan dari peserta biasanya dilarang sebab tiap peserta yang akan berbicara harus dengan izin moderator untuk menjamin ketertiban diskusi.

b. Diskusi Informal

⁷Muhaimin, dkk. Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), hlm. 83-84

⁸ Abu Ahmadi, Metode Khusus Pendidikan PPKN (Jakarta : PT. Bima Aksara, 1986), hlm. 114

Aturan dalam diskusi ini lebih longgar dari pada diskusi-diskusi lainnya, karena sifatnya yang tidak resmi. Penerapannya bisa dalam diskusi keluarga, dan dalam belajar mengajar dilaksanakan dalam kelompok-kelompok belajar dimana satu sama lain bersifat “*Face to face relationship*”.

c. Diskusi Panel

Dalam diskusi ini ada dua kategori peserta, yaitu: peserta aktif dan non aktif. Peserta aktif langsung melibatkan diri dalam diskusi, sedangkan peserta non aktif hanya menjadi pendengar. Adakalanya peserta non aktif ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki wakil-wakil yang ditugasi berbicara atas nama kelompoknya.

d. Diskusi dalam bentuk *Symposium*

Diskusi ini hampir sama dengan diskusi formal lainnya, hanya saja diskusi *symposium* disampaikan oleh seorang pemasaran atau lebih (umumnya lebih). Pemasaran secara bergiliran menyampaikan uraian pandangannya mengenai topik yang sama atau salah satu dari topik yang sama tersebut. Dan diskusi *symposium* ini biasanya tidak mencari kebenaran tertentu.

e. Lecture Discussion

Diskusi ini dilaksanakan dengan membeberkan suatu persoalan, kemudian didiskusikan. Disini biasanya hanya satu pandangan atau satu persoalan saja.

f. Whole Group

Kelas merupakan satu kelompok diskusi. *Whole group* yang ideal apabila jumlah anggota tidak lebih dari 15 orang.

g. Buzz Group

Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 4-5 orang. Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. Diskusi diadakan di tengah atau di akhir pelajaran dengan maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, memperjelas bahan pelajaran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan.

h. Synchronize Group

Suatu kelompok (kelas) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. Guru menjelaskan garis besarnya problema kepada siswa, guru menggambarkan aspek-aspek masalah, kemudian tiap-tiap kelompok (*synchronize*) diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Guru menyediakan referensi atau sumber-sumber informasi lain.

i. Brain Storming Group

Dalam diskusi ini setiap kelompok harus menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang diharapkan agar anggota kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukannya yang dianggap benar.

j. Fish Bowl

Diskusi ini dipimpin oleh satu orang yang mengetahui sebuah diskusi dan tujuan diskusi ini adalah untuk mengambil suatu kesimpulan. Dalam diskusi ini tempat duduk diatur setengah lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap ke peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk

mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam mangkok (*fish bowl*).⁹

E. Implementasi Pembelajaran PPKN Melalui Metode Diskusi

Implementasi pembelajaran PPKN melalui metode diskusi yaitu menerapkan ide, konsep yang ada didalam metode diskusi kedalam pembelajaran PPKN. Dengan kata lain yaitu sistem pembelajaran PPKN di kelas diterapkan dengan menggunakan metode diskusi.¹⁰

Akhir Abad XX dan awal Abad XXI menjadi titik awal bermacam-macam perubahan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah, keterbukaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi isu sentral dan mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia. Pengajaran yang memuat nilai-nilai budaya bangsa memang masih dianggap perlu, tetapi pendekatan yang digunakan bukan bersifat dogmatis dan indoktrinatif. Masyarakat yang semakin berpendidikan menuntut perlakuan yang kritis pula, sehingga pengkajian nilai budaya dilakukan dengan cara kritis dan rasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembelajaran di lingkungan sekolah untuk menciptakan kesadaran akan nilai-nilai budaya tersebut pada diri siswa, sehingga akan terwujud generasi yang mencintai dan menghargai nilai budaya bangsa dan negaranya sendiri. Disinilah peran akan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.¹¹

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pada Mata Pelajaran Pendidikan

⁹Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 20-23

¹⁰ Ahmad Mukminun M.Pd.I, *Wawancara*, Ruang Istirahat, 10 November 2022

¹¹ Jurnal Pendidikan. 2002. Beberapa Inovasi Pendidikan. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.

Kewarganegaraan juga merupakan praktik belajar Kewarganegaraan sebagai inovasi pembelajaran untuk memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar dengan life skill (kecakapan hidup). Life Skill (kecakapan hidup) dalam pengalaman belajar terbagi atas: Self Awareness Skill yaitu kesadaran sebagai makhluk hidup; kesadaran akan eksistensi diri, kesadaran akan potensi diri, Thingking Skill yaitu kecakapan menggali informasi; kecakapan mengolah informasi; kecakapan memecahkan masalah, Social Skill yaitu kecakapan komunikasi lisan; kecakapan komunikasi tertulis; kecakapan bekerja sama, Academic Skill yaitu kecakapan mengidentifikasi variabel, kecakapan menghubungkan variabel; kecakapan merumuskan hipotesis, Vocational Skill yaitu kecakapan melaksanakan penelitian; sering disebut juga kecakapan kejuruan; terkait dengan bidang pekerjaan tertentu.¹²

Pengalaman belajar Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas dengan metode diskusi. Siswa diharapkan aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan berpartisipasi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggungjawab, berpikir kritis, terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan para pelajar kurang intensif, sehingga mereka tidak menjadikan nilai-nilai dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pedoman. Bisa kita lihat di media masa atau televisi, bahwa tindak kejahatan sering dilakukan oleh para pelajar. Sungguh memprihatinkan jika keadaan moral generasi bangsa kita yang sangat mengengaskan seperti sekarang ini, bagaimana dengan masa depan bangsa di masa depan jika generasi mudanya tidak bermoral.¹³

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2002. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku 5 Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual. Jakarta: Depdiknas.

¹³ Kaelan, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: PARADIGMA

Disinilah peran guru dalam menanamkan nilai-nilai budaya bangsa pada diri siswa sangat besar, diperlukan suatu kemampuan yang lebih untuk membimbing siswa hingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dituntut untuk dapat memahami makna dari pembelajaran tersebut sehingga siswa lebih mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat serta negara. Selain untuk menumbuhkan kesadaran berkewarganegaraan yang baik pada siswa, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk menghasilkan prestasi belajar yang tinggi pada siswa. Dengan semakin tinggi nilai prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan, siswa lebih mudah untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.¹⁴

Dalam melaksanakan metode diskusi pimpinan diskusi dapat dipegang oleh guru atau meminta salah satu siswa/peserta didik. Sedangkan berdasarkan teknik pelaksanaannya menurut Moh. Ali diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama Debate, Dalam hal ini terdapat dua kelompok yang mempertahankan pendapatnya masing-masing yang bertentangan, sehingga pendengar dijadikan sebagai kelompok yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dalam keputusan akhir, Kedua diskusi, Pada dasarnya merupakan musyawarah untuk mencari titik pertemuan pendapat, tentang suatu masalah.

Secara umum langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan metode diskusi adalah: (a) Menemukan masalah yang layak untuk didiskusikan; (b) Menjelaskan masalah tersebut; (c) Mengatur giliran pembicaraan; (d) Memberi kesempatan kepada orang-orang yang akan berbicara secara bergiliran; (e) Mengembalikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa kepada peserta diskusi; (f) Mengarahkan pembicaraan pada rel

¹⁴ Kasbolah, Kasihani. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

yang sebenarnya bila terjadi penyimpangan pembicaraan; dan (g) Memimpin siswa dalam mengambil keputusan atau kesimpulan.¹⁵

Dalam perkembangan dunia pendidikan, ditandai dengan dunia perubahan dan peningkatan baik dari segi kualitas maupun segi dari kuantitasnya. Harapan dari berkembangnya tingkat peradaban pada era globalisasi ini perlu sebagai bentuk pencerminan dari Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) terhadap para peserta didik dalam bentuk tingkah laku.¹⁶



¹⁵ Kasihani dan Astini, Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Makalah pada Pelatihan TOT Guru Mata Pelajaran SLTP dan SMP dari Enam Propinsi. Di Surabaya tanggal 20 Juni 2/d 6 Juli 2001.

¹⁶ Nurhadi, 2002. Pendekatan Kontekstual. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

